



IDENTITAS SEKOLAH
SMK YMIK JAKARTA



ELEMEN :

PANCASILA



KELAS/SEMESTER
IX (SEBELAS)/1



ALOKASI WAKTU
6 X (45 Menit)



Dedih, S.Pd



087809814051



dedih00@guru.smp.belajar.id

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik

A



CAPAIAN PEMBELAJARAN

(Fase F)

Peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologo terbuka serta peluang dan tantangan penerapan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan global. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari



TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pemikiran para pendiri bangsa dalam pembentukan dasar negara;
2. Menjelaskan penerapan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara ;
3. Memaparkan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, serta;
4. Menganalisis manfaat gotong royong



LINGKUP MATERI

- A. Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila
- B. Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
- C. Peluang dan Tantangan Berpancasiladikehidupan Global
- D. Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan



ASSESSMENT



Pengotahuan



Keterampilan



Sikap

1. Partisipasi diskusi
2. Peta pikiran
3. Bermain Peran
4. Pemahaman materi (esai)

1. Menyampaikan pendapat

1. Observasi guru
2. Penilaian diri sendiri
3. Penilaian teman sebaya





APERSEPSI



Gambar suasana sidang perumusan Pancasila

Aktivitas :

1. Amatilah gambar diatas !
2. Jawablah soal pemantik, dan jawablah pada kolom yang disediakan !

1. Apakah yang anda ketahui tentang Pancasila ?

2. Bagaimanakah proses perumusannya ?

3. Apa saja nilai – nilai kehidupan yang ada pada Pancasila ?



PEMAHAMAN BERMAKNA

Pada unit ini, kita akan mengkaji dan menafsirkan cara pandang beberapa pendiri bangsa tentang dasar negara. Mereka adalah Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Selain itu, juga akan dibahas pendapat tokoh-tokoh tentang hubungan agama dan negara sebagai salah satu yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan dasar negara, seperti yang disampaikan oleh Moh. Hatta.

Setelah sidang pertama BPUPK, dibentuklah Panitia Kecil. Hasil dari Panitia Kecil ini adalah dicapainya kesepakatan antara, yang oleh Soekarno disebut sebagai, “kelompok Islam” dan “kelompok kebangsaan”, sebagaimana yang tertulis dalam *Preamble* atau Mukaddimah. Perbincangan tentang dasar negara kembali mengemuka pada saat sidang PPKI yang berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Fokus pembicaraan pada saat itu adalah soal “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Pada kenyataanya, meskipun para pendiri bangsa memiliki pendapat masing-masing tentang dasar negara, para anggota BPUPK — serta para pendiri bangsa lainnya yang tidak tergabung ke dalam BPUPK— memiliki cita-cita yang sama, yakni kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan Indonesia.

Karena itu, pada unit ini, peserta didik diajak untuk memetakan pemikiran yang muncul dari para pendiri bangsa tentang dasar negara serta bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara.

Kemampuan peserta didik memetakan pemikiran para pendiri bangsa ini merupakan hal penting sebagai bagian dari kemampuan berpikir kritis, sebagaimana yang dirumuskan dalam Profil Pelajar Pancasila.





SOAL DRAG AND DROP



Tokoh yang Mengusulkan Rumusan Dasar Negara

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

1. Persatuan (Unitarisme)
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa



PILIHAN GANDA

1. BPUPKI dibentuk pada tanggal...

- a. 1 Maret 1945
- b. 2 Maret 1945
- c. 3 Maret 1945
- d. 4 Maret 1945

2. BPUPKI diketuai oleh ...

- a. Soeroso
- b. Koiso
- c. Ichibangase Yosio
- d. Radjiman Wedyodiningrat

Bagaimana perasaan saat ini ? Beri Tanda



**Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila**

Sebagaimana diulas dalam buku PPKn Kelas X, ada banyak anggota BPUPK yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tidak hanya Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, melainkan juga ada Hatta, H. Agus Salim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan lain-lain. Diskusi dan saling menanggapi, bahkan saling sanggah, terjadi selama persidangan.

Hal tersebut tentu sebuah kewajaran, bahkan keharusan. Disebut kewajaran karena setiap orang niscaya memiliki pemikiran yang berbeda-beda akibat perbedaan latar belakang, sudut pandang, cita-cita, dan lain sebagainya. Bahkan, disebut keharusan karena yang menjadi subjek pembicaraan adalah negara besar, tidak hanya dari aspek geografis dan jumlah populasi, melainkan juga kaya akan sumber daya alam dan tradisi.

Pada titik ini, diskusi, saling menanggapi bahkan saling sanggah dalam persidangan adalah wujud demokrasi. Namun demikian, para anggota BPUPK—serta para pendiri bangsa lainnya yang tidak tergabung dalam BPUPK—memiliki cita-cita yang sama, yakni kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan Indonesia.

Kontribusi pemikiran sejumlah tokoh lainnya juga tidaklah sedikit. Usulan Soepomo, misalnya, terkait bentuk negara integralistik serta struktur sosial bangsa Indonesia menjadi kerangka penting dalam merumuskan negara merdeka. Begitu juga dengan anggota BPUPK lainnya.

Tak hanya pada sidang pertama BPUPK, perbincangan tentang dasar negara terus dimatangkan baik dalam Panitia Kecil maupun pada saat sidang kedua BPUPK. Hasil dari Panitia Kecil yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK, dicapainya kesepakatan antara, yang oleh Soekarno disebut sebagai, “kelompok Islam” dan “kelompok kebangsaan”, sebagaimana yang tertulis dalam *Preamble*, atau Mukaddimah. Hasil kesepakatan ini dibacakan oleh Soekarno sebagai ketua Panitia Kecil dihadapan sidang BPUPK yang kedua. Pada sidang kedua ini, anggota BPUPK banyak mendiskusikan soal bentuk negara, ketimbang soal dasar negara.

Perbincangan tentang dasar negara kembali mengemuka pada saat sidang PPKI yang berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Fokus pembicaraan pada saat itu adalah soal “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Soekarno mengusulkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan—atasi saran rekannya yang ahli bahasa—penamaan Pancasila terhadap kelima dasar tersebut, yakni 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial, dan 5) Ketuhanan. Namun, selain dari kelima dasar tersebut, Soekarno juga menyiapkan kumpulan dasar negara lainnya, apabila kelima dasar sebelumnya tidak dapat diterima. Ia menyarankan (trisila): Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokratik, dan Ketuhanan. Jika pun ketiga dasar ini dirasa kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar (ekasila), yang diperoleh dari ketiga dasar tersebut, yaitu Gotong Royong.

Moh. Yamin sebagai pendiri bangsa, juga turut andil dalam memberikan ide terhadap rancangan dasar negara, yang juga terdiri dari 5 dasar, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai pakar hukum, Soepomo mengawali rancangan ide dasar negara dengan menjabarkan syarat-syarat berdirinya negara, yaitu daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat berdasarkan hukum internasional. Untuk dasar negara sendiri, Soepomo mengusulkan 5 dasar bagi negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Selain kedua tokoh tersebut, ada juga Moh. Hatta yang menyampaikan bahwa Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menyetujui dibentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi.

Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendi demokrasi, dalam negara kesatuan, kekuatan terbesar ada pada rakyat, sehingga rakyat

mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi.

Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dinamika Perumusan Pancasila

Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara turut mewarnai sidang BPUPK kala itu. Para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berbeda pendapat soal ini. Sebagian menghendaki Islam menjadi dasar negara, sebagian lainnya berpandangan bahwa negara Indonesia tidak perlu menjadikan agama sebagai dasar negara. Soekarno dan Hatta, misalnya, adalah tokoh yang berpandangan bahwa negara Indonesia tidak dapat didasarkan kepada Islam. Sementara itu, Moh. Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, sebagai bagian dari demokrasi serta untuk menghindari perpecahan, maka dicarikan titik temu dalam Panitia Sembilan yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia Sembilan menyepakati *preamble* yang disampaikan oleh Soekarno, selaku ketua Panitia Sembilan, dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945. *Preamble* ini merupakan persetujuan bersama antarkalangan yang semula berbeda pendapat. Ini adalah potret sebuah proses demokrasi yang indah. Perdebatan dan perbedaan pendapat bukanlah suatu permusuhan, melainkan bagian dari iktikar bersama untuk mencari rumusan dasar negara Indonesia yang tepat.

